

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu pemerintahan daerah adalah sebagian dari pada bentuk suatu pemerintahan negara yang mempunyai daerah otonom dan di dalam penyelenggaraannya berdasarkan azas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Dan maksud dari dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Untuk itu, setiap warga negara akan mengetahui dimana kedudukannya, apa hak dan kewajibannya di dalam kehidupan bernegara.

Sebagai fasilitas berlangsungnya pemerintahan di daerah maka kantor Kabupaten Daerah Tingkat II mempunyai tujuan dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipimpin oleh seorang bupati kepala daerah.

Agar pemerintahan di daerah dapat berlangsung diperlukan unsur-unsur management yang akan melayani masyarakat secara administratif maupun operasional. Kemudian untuk memperoleh efisiensi kegiatan kerja, pelayanannya perlu didukung oleh organisasi pemerintahan, personil, peralatan dan wadah kegiatan yang efisien. Susunan dan pembentukannya harus disesuaikan dengan UU No.5/Th 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang disesuaikan

aikan dengan Pasal 4 Bab III mengenai daerah otonom yang berbunyi bahwa : "Daerah dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional dan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab".

Demikian pula halnya dengan Kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin, didalam perkembangannya hingga saat ini memiliki fungsi dan perananan yang sangat penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Pusat pemerintahan tingkat kabupaten dan sebagai Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- b. Pusat Utama Wilayah Pembangunan (WP)C dan Sub Pusat Utama Wilayah Pembangunan (WP) Sekayu dalam sistem pewilayahan Sumatera Selatan, Wilayah Pembangunan Sekayu dengan pusatnya di kota Sekayu meliputi sebagian Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- c. Pusat Utama BWK C.
- d. Pusat distribusi barang dan jasa Kabupaten DT II Musi Banyuasin.
- e. Pusat penyediaan dan pelayanan fasilitas sosial, ekonomi dan budaya,
- f. Pusat pelayanan transportasi.

Fungsi dan peranan tersebut diatas merupakan potensi utama bagi pembangunan dan perkembangan kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin. Hal ini karena semua kegiatan penting seperti : pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, transportasi dan fasilitas pelayanan umum dalam skala lokal berpusat di kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin. Namun demikian, hal ini sekaligus juga merupakan faktor penarik utama bagi penduduk untuk berurbanisasi ke kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin.

Adanya berbagai karakteristik dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas akan sangat mempengaruhi perkembangan struktur tata ruang kota, seperti : meningkatnya kegiatan komersial kota, perkembangan pemukiman baru dan kebutuhan fasilitas pelayanannya, kebutuhan perluasan, sistem jaringan transportasi, meningkatnya kegiatan perdagangan, perkantoran yang selanjutnya membutuhkan areal pengembangan baru atau terjadinya intensifikasi penggunaan tanah di beberapa kawasan tertentu dan lain-lain.

Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi bentuk dan struktur kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin di masa yang akan datang. Dengan demikian agar perkembangan fisik kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin dapat menjadi wadah pelayanan optimal bagi terselenggaranya segenap kegiatan penduduk kota maupun daerah belakangnya/daerah pengaruh, maka diperlukan adanya pengarahan dan pengendalian kota secara bertahap dan operasional.

Disisi lain, Pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin telah merencanakan juga untuk meningkatkan status dari kota Sekayu, dari Kabupaten DT II (Kota Administratif) menjadi Kota Madya. Kebijakan ini tentu akan memberikan implikasi yang luas terhadap perkembangan dan pengembangan kota Sekayu dimasa datang, baik dari segi rung fisik maupun fungsi dan peranan kotanya. Menghadapi berbagai implikasi yang akan muncul sebagai akibat peningkatan status kota Administratif Sekayu menjadi Kota Madya, maka gagasan pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin untuk memindahkan Ibukota Kabupatennya dari wilayah yang berorientasi disepanjang aliran sungai Musi (sebelah selatan Kota Sekayu yang lama / BWK C), ke Ibukota Kecamatan Sekayu, juga merupakan Ibukota DT II Musi Banyuasin yang terletak di bagian utara Ibukota Propinsi Tingkat I Sumatera Selatan (Palembang).

Dalam hal ini dapat dinilai sebagai langkah yang tepat dan strategis. Untuk kemudian Ibukota Kabupaten ini akan mendukung penanggulangan berbagai permasalahan kota Administratif Sekayu dan memberi keleluasaan bagi pengembangan dirinya menjadi Kotamadya (dimana sebagian Ibukota Kabupatennya dapat mempersilakan wilayahnya). Dengan pemindahan Ibukota Kabupaten tersebut berarti sebagian beban fisik dan beban fungsi Kotanya akan dialihkan. Dan ibukota kabupaten yang baru diharapkan dapat mewujudkan suatu pengakuan umum dari masyarakat, yang akan menduduki dan menumbuhkan " Citra " pusat pemerintahan yang sebenarnya.

Situasi di atas sekaligus dijadikan alasan pemerintahan Daerah Tingkat II Musi Banyuasin untuk memindahkan semua fasilitas fisik penunjang kawasan pusat pemerintahan ke kota " Baru " ibukota kecamatan Sekayu. Salah satunya fasilitas fisik yang menjadi prioritas utama kegiatan pemerintahan adalah kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, yang sebagai wadah pelaku fungsi eksekutif. Kantor bupati ini harus dapat menampilkan satu identitas fisik sesuai kedudukannya yang tertinggi dalam fungsi pelayanan terhadap masyarakat wilayah Kabupaten DT II Musi Banyuasin, sehingga apa yang diharapkan dapat mendukung dan menumbuhkan 'citra' pusat pemerintahan yang sebenarnya.

B. PERMASALAHAN

I. Non Arsitektural (soft ware/non teknis)

Bagaimana meningkatkan hasil guna dan daya guna dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang citra kota.

II. Arsitektural (hard ware/teknis)

- Bagaimana merencanakan/merancang suatu kompleks pemerintahan Kabupaten DT II Musi Banyuasin menjadi pusat orientasi warga kota baik secara simbolis maupun fungsional, melalui ungkapan tata ruangnya.
- Bagaimana menampilkan bentuk fisik bangunan kantor bupati sebagai salah satu prioritas utama wadah kegiatan pemerintahan DT II Musi

Banyuasin yang sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat memberikan citra sebagai pusat pemerintahan yang sebenarnya.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Memberikan alternatif design kantor pemerintahan Ibu Kota sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyuasin di dalam pembangunan kawasan baru yang sedang dilaksanakan sesuai dengan Perda setempat, kedalam suatu uraian proses perancangan fisik yang didasarkan pada pengkajian kondisi yang ada.

2. Sasaran

- Mencoba merumuskan cara untuk memberikan citra kota Sekayu-Kabupaten DT II Musi Banyu -asin, melalui suatu analisa dan studi lokasi pusat pemerintahan khususnya dari faktor kondisi fisik dan lingkungannya.
- Menyusun konsep perencanaan dan perancangan tata ruang pusat pemerintahan Kabupaten DT II Musi Banyuasin di Sekayu dengan fasilitas kantor bupatinya, atas dasar fungsi dan peran terhadap kota.



D. LINGKUP PEMBAHASAN

- Pembahasan ditinjau dari skala lingkungan kota (kompleks pusat pemerintahan) yang sebelumnya dibahas secara selintas dari skala regional (kaitannya dengan Propinsi Sumsel) dan skala kota baru sesuai dengan perencanaan kawasan yang sedang dilaksanakan (Ibu Kota Sekayu).
- Porsi pembahasan terbesar adalah pada design bangunan kantor bupati dalam kaitannya terhadap optimalisasi tata ruang pusat pemerintahan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Tata urutan penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, yaitu memberi gambaran tentang latar belakang permasalahan yang dihadapi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tata cara penulisan.
- Bab II. Penjelasan Umum, menjelaskan tentang program-program pemerintahan yang berkaitan dengan permasalahan, batasan-batasan yang digunakan dalam perencanaan serta dasar teori yang menunjang analisis,
- Bab III. Analisis, membahas kaitan antara program pemerintahan dan batasan perencanaan yang ada (terutama dari faktor kondisi fisik dan lingkungan) dengan masalah arsitektur.
- Bab IV. Konsep Perencanaan dan Perancangan merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.